

Akuntabilitas Pengelolaan Objek Kebun Raya Mangrove terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Wonorejo Surabaya

Woeri Ayu Rizqillah^{1*}, Mohammad Nizarul Alim²

^{1,2} Universitas Trunojoyo Madura

Jl. Raya Telang Kamal, Bangkalan Kode Pos 69162, Indonesia

woeriayu76@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to describe how accountability in the management of Mangrove Botanical Gardens objects improves people's welfare. Tourism management must be followed by the implementation of accountability carried out by tourism managers. This research uses a qualitative method with a case study approach or (case study) which is a type of descriptive qualitative research. Managerial accountability, program accountability, policy accountability have been said to be adequate and fulfilled for several reasons, namely: in the management of the mangrove botanical garden there is a reforestation program which is a priority program in establishing the Wonorejo mangrove botanical garden in Surabaya. Then the result of the policy objective of this permit to establish mangroves is to make the mangrove botanical garden a tourist and educational place for tourists so that the impact of this mangrove botanical garden on the surrounding community is enormous to increase the family's economy and can help the surrounding community who do not have job opportunities outside. Although sometimes their income is not significant or erratic every month. While the aspects of the dimensions of legal accountability and honesty and financial accountability are still inadequate and fulfilled because in the implementation of the Regional Regulation of the City of Surabaya No. 23 of 2012 has not been implemented optimally. Then in the management of the mangrove botanical garden there is no management of financial reports on every budget issued and income by the Mangrove Information Center, so there is no reporting that can be accounted for regarding the existing financial budget.

Keywords: *accountability, management of tourist objects, community welfare.*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan objek Kebun Raya Mangrove terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan wisata harus diikuti dengan penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola wisata. Karena adanya perubahan keadaan dan kondisi yang digunakan, maka pengelolaan pariwisata menjadi sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus atau (*case study*) yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan telah dikatakan memadai dan terpenuhi karena beberapa hal yaitu: dalam pengelolaan kebun raya mangrove terdapat program penghijauan yang menjadi program prioritas dalam mendirikan kebun raya mangrove Wonorejo Surabaya. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan mangrove ini adalah membuat kebun raya mangrove menjadi tempat wisata dan edukasi bagi wisatawan sehingga dampak kebun raya mangrove ini bagi masyarakat sekitar sangatlah besar untuk menambah perekonomian keluarga dan dapat membantu masyarakat sekitar yang tidak punya peluang pekerjaan di luar. Meskipun kadang pendapatan mereka tidak signifikan atau tidak menentu setiap bulannya. Sementara pada aspek dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran dan akutabilitas finansial masih belum memadai dan terpenuhi karena dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 23 Tahun 2012 belum terlaksana maksimal. Kemudian pada pengelolaan kebun raya mangrove tidak adanya dengan pengelolaan laporan keuangan pada setiap anggaran yang di keluarkan dan pemasukan oleh *Mangrove Information Center*, sehingga belum ada pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai anggaran keuangan yang ada.

Kata Kunci: *akuntabilitas, pengelolaan objek wisata, kesejahteraan masyarakat.*

Pendahuluan

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia terbukti memiliki pengaruh cukup besar dalam meningkatkan pendapatan negara dan daerah (Mu'im, 2022). Dalam perkembangan ini seyogyanya diimbangi dengan mengintegrasikan dan meningkatkan fungsi pilar pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan (Kemenparekraf, 2020). Salah satu elemen yang diperlukan untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia adalah tersedianya data yang akurat, konsisten, dan dapat diakses secara bebas oleh semua pihak (Susio *et al.*, 2020).

Ekonomi pariwisata adalah kegiatan yang terkait dengan fenomena pariwisata yang bertujuan untuk memanfaatkan modal, manusia, keuangan, dan sumber daya alam yang tersedia untuk menghasilkan barang dan jasa terkait pariwisata dalam jumlah yang sebesar-besarnya (Suartini & Utama, 2011). Mu'im (2022) mengatakan bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal daerah dengan membuka lapangan kerja dan menghasilkan uang bagi penduduk lokal melalui pengembangan usaha perdagangan dan jasa. Dari sisi sosial, pariwisata berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, apresiasi terhadap tradisi, seni, dan budaya negara, serta penguatan jati diri bangsa Mu'im (2022).

Pertumbuhan industri pariwisata sangat penting bagi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan (Putra *et al.*, 2019). Sektor pariwisata di Indonesia saat ini memberikan sumbangan dalam meningkatkan devisa maupun lapangan kerja (Yati *et al.*, 2022). Pariwisata juga diharapkan dapat meminimalisir kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran (Elsa, 2022). Semakin banyaknya wisatawan yang datang maka semakin banyak pula manfaat ekonomi yang didapatkan pula (Yati *et al.*, 2022). Pengembangan dalam pariwisata terus diupayakan agar menjadi faktor kunci dan memberikan dampak secara positif kepada elemen terkait di dalamnya (Kemenparekraf, 2021). Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan, memberikan peluang usaha serta dapat memberikan kesempatan kerja untuk masyarakat sekitar (Elsa, 2022). Pada dasarnya menurut Hilman & Kartika (2020) ada tiga kelompok utama yang terlibat dalam pengembangan pariwisata antara lain:

1. Membuat objek pariwisata di kawasan wisata populer, yang dimana akan menjadi daya tarik bagi pengunjung yang ingin berkunjung ke tempat tersebut.
2. Fasilitas lokasi, seperti penginapan, rumah makan, hiburan.
3. Transportasi yang dapat diakses dari tempat tujuan wisata ke objek wisata serta transportasi yang menghubungkan titik awal pengunjung dengan kawasan tujuan wisata.

Mengingat bahwa ekowisata merupakan komponen yang sangat penting saat ini, tentu pemerintah harus memberikan perhatian dan mengembangkan potensi wisata yang ada di setiap daerah (Garang *et al.*, 2020). Salah satunya adalah Kota Surabaya yang memiliki destinasi berbasis keindahan alam yang dimilikinya (Rusdiana., 2019). Kota Surabaya yang berada di pesisir pantai timur pulau Jawa memiliki berbagai tempat wisata terdiri dari wisata romokalisari adventure land, wisata kebun raya mangrove, wisata taman hiburan pantai Kenjeran, wisata sotoh laut, wisata taman hutan raya. Ekosistem mangrove di Pamurbaya (Pantai Timur Surabaya) merupakan salah satu kawasan yang mendapat perhatian khusus, karena Mangrove Wonorejo Surabaya dibudidayakan oleh masyarakat sekitar (Garang *et al.*, 2020).

Adanya pemanfaatan sumber daya kawasan pesisir pantai dan jika antar sistem dalam kawasan dapat terjaga dengan baik, maka masyarakat dapat memberikan kesejahteraan secara optimal dan berkelanjutan bagi mereka (Dona & Irma., 2020). Hutan bakau di Indonesia merupakan yang terluas di dunia, akan tetapi saat ini banyak hutan bakau yang telah musnah dan rusak akibat penebangan sembarangan (Murtini, 2017). Agar bisa menjaga potensi hutan bakau tersebut maka dijadikannya tempat wisata dengan sebutan wisata hutan mangrove (Tarigan *et al.*, 2018).

Mangrove memiliki fungsi sebagai perisai alam atau buffer dan fungsi untuk menstabilkan tanah menggunakan cara memerangkap serta menangkap material endapan

yang dibawa dari arah sungai dan mengarah pada laut (Idrus *et al.*, 2018). Kegiatan pariwisata mangrove tersebut dapat menimbulkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar apabila dikelola secara baik (Elsa, 2022). Seiring berjalannya waktu, di Indonesia wisata hutan mangrove tak hanya dimanfaatkan sebagai tempat wisata saja kan tetapi dianggap juga sebagai edu mangrove yang dimana edu mangrove ini diberikan kepada masyarakat, siswa-siswi dan mahasiswa seperti apa tujuan mangrove, berbagai jenis mangrove, proses penanaman mangrove, dan berbagai bentuk pendidikan hutan mangrove (Hertati, 2020).

Ekowisata mangrove yang menerapkan pengelolaan yang baik dapat mencapai tujuan organisasinya (Kunen, 2015). Organisasi yang memiliki akuntabilitas yang baik merupakan harapan bagi masyarakat dikarenakan dengan akuntabilitas yang baik suatu organisasi akan memberikan dampak yang baik pula bagi publik (Kemenkeu, 2018). Pada sistem pemerintahan dan kewajiban daerah, manajer publik harus dapat beralih dari posisi pasif ke posisi dimana mereka menjadi seseorang yang berpartisipasi aktif dalam menetapkan standar akuntabilitas yang sejalan dengan keinginan dan harapan publik (Putu *et al.*, 2018).

Akuntabilitas sangat penting untuk pengelolaan keuangan yang efektif di setiap organisasi, termasuk di sektor publik dan swasta (Yanti & Arifin, 2020). Suatu organisasi dapat dianggap sudah melakukan pertanggungjawaban kepada mereka yang memberikan amanah kepada masyarakat luas jika telah mengadopsi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangannya (Astawa & Dewi, 2021). Tanpa diterapkannya prinsip akuntabilitas dan transparansi oleh pihak agent atau pengelola dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak pemberi amanah (principal) sehingga akan dapat mempengaruhi keberlangsungan dari organisasi tersebut (Gibran *et al.*, 2021).

Akuntabilitas memiliki arti sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat atas pelayanan atau sesuai dengan pemahaman dari masyarakat itu sendiri (Mulgan, 2000). Akuntabilitas salah satu elemen utama yang dapat menjadikan good governance dan sering menjadi pembahasan publik (Zainuddin, 2018). Akuntabilitas dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dan menguraikan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang mempunyai pendapat untuk meminta pertanggungjawaban (Bovens, 2007). Perlunya akuntabilitas ini juga berguna dalam mengurangi resiko kecurangan (Castiglione, 2012).

Corporate governance adalah kunci untuk meningkatkan efisiensi perekonomian yang melibatkan sejumlah interaksi antara manajemen perusahaan, pemegang saham, direksi dan stakeholder lainnya (Solihin, 2007). Memahami tata kelola perusahaan yang kuat sangat penting karena membantu organisasi mengadopsi akuntabilitas, yang harus dihormati oleh semua organisasi untuk meningkatkan kesadaran di antara para stakeholder (Almashhadani, 2021). Dapat disimpulkan bahwa corporate governance merupakan suatu tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antar stakeholder untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan (Solihin, 2007).

Tidak hanya organisasi pemerintahan saja yang dituntut untuk menerapkan konsep akuntabilitas pada pelaporannya, namun organisasi non pemerintahan pun sudah mulai mendapat tuntutan untuk menyampaikan laporan keuangannya secara terbuka dan akuntabel (Shil, 2014). Pengelolaan wisata harus diikuti dengan penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh pengelola (Putu *et al.*, 2018). Adanya perubahan keadaan dan kondisi yang digunakan, maka pengelolaan pariwisata menjadi sangat penting (Indriasih & Sulistyowati, 2022).

Masalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan wisata program pariwisata memiliki implikasi dan dampak sangat besar terhadap pembangunan wisata setiap kabupaten atau kota wilayah yang di Indonesia (Susio *et al.*, 2020). Pembangunan dibidang kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong, meningkatkan kehidupan ekonomi dan sosial budaya serta nilai hidup yang ada dalam masyarakat (Saputra

& Ali, 2020). Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik (Saputra & Ali, 2020). Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang lalu pada tahun 2020, yang mana objek wisata ini dapat membantu kesejahteraan masyarakat dengan menyalurkan dana untuk bantuan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan dan mengembangkan sebuah penelitian, objek daerah penelitian dan akuntabilitas yang digunakan pada penelitian sebelumnya merupakan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang. Adapun penulis mengambil data-data tersebut ialah sebagai bahan perbandingan. Telah dijelaskan dalam penelitian Astawa & Dewi (2021) yang meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan objek wisata aling-aling waterfall menjadi sumber pendapatan tambahan bagi desa sambangan. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan aset wisata air terjun aling-aling waterfall menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan keuangan telah terpenuhi, sehingga menghasilkan peningkatan kesejahteraan anggota kelompok dan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil penelitian dari Gibran *et al* (2021) menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat bahwa pemerintahan desa Jangka Alue telah melaksanakan pertanggungjawaban kegiatan pelaporan dengan baik, dan pertanggungjawaban kegiatan juga telah dilaksanakan dengan baik. Penelitian dari Kunen (2015) yang meneliti tentang transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam kemitraan pemerintah swasta dan masyarakat sipil untuk mengelola Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya. Ketiganya menekankan pada transparansi interaksi antar domain governance dalam kemitraan pengelolaan kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya, yang telah mendapat finansial dari masyarakat sipil untuk partisipasi. Kurangnya sumber daya, kemitraan dalam pengelolaan kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil tidak dapat memaksimalkan pemulihan dan pelestarian hutan mangrove, sehingga fungsi pengendalian terkait aspek lingkungan masih sangat minim.

Perbedaan penelitian di atas peneliti akan mengkaji 5 unsur dimensi akuntabilitas yakni akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas program, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas finansial yang mana akuntabilitas ini pembahasannya lebih luas dari pada penelitian terdahulu yang relevan. Disini pengelolaan wisata yang benar harus diikuti dengan penerapan akuntabilitas oleh pihak pengelola/dinas ketahanan pangan dan pertanian Kebun Raya Mangrove Wonorejo sebagai agent/manajemen kepada pemerintahan kota sebagai principal.

Alasan lain dari penelitian sebelumnya, mengapa peneliti memilih objek Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya karena objek ini yang mengelola adalah Pemerintahan Kota Surabaya melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Apapun yang dikelola dibawah naungan pemerintah itu pasti perlu aspek hukum dan kebijakan bukan sekedar disebut pendapatan devisa dan adanya ketimpangan antara teori dan di lapangan. Maka dari itu peneliti meneliti pengelolaan objek Kebun Raya Mangrove dengan aspek 5 unsur dimensi akuntabilitas

Metode Penelitian

Menurut Sugioyono (2020:7) metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasarkan positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah dan melibatkan peneliti sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugioyono, 2020:19). Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gejala, fakta atau kejadian karakteristik suatu kelompok atau daerah tertentu secara metodis dan tepat. Dalam penelitian deskriptif biasanya tidak perlu mencari atau menjelaskan hubungan timbal balik dan menguji hipotesis (Ahyar *et al.*, 2020:54).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dilakukan dengan pengambilan informasi secara langsung. Data kualitatif berupa kata-kata lisan atau tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif berupa data terperinci, kutipan langsung, dan dokumen kasus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa pada akuntabilitas hukum dan kejujuran prosedur atau aturan pada MIC (*Mangrove Information Center*) Wonorejo Surabaya telah dilaksanakan dengan baik dan setiap pegawai mendapatkan *jobdesk* yang telah di bagikan oleh koordinator pengelola atau MIC. Sedangkan dalam implementasi Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2012 tentang kepariwisataan khususnya dalam melaksanakan kewajiban kepariwisataan di Kawan Kawaan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya belum terlaksana maksimal, karena masih banyak Peraturan Daerah yang tidak berjalan optimal atau sebagaimana yang direncanakan. Mengingat masih belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana di Kebun Raya Mangrove yang dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan dana. Berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa akuntabilitas manajerial pengelolaan organisasi pada *Mangrove Information Center* Wonorejo Surabaya sudah terbilang cukup efektif dan efisien. Dengan adanya sistem organisasi yang terstruktur mereka semua dapat memberikan informasi yang jelas, saling tolong menolong terhadap pekerjaan, tidak lupa dengan ide-ide kreatif dan kritik saran dari setiap para pengelola. Tidak lupa juga dengan adanya beberapa pihak swasta yang ikut turut membantu dalam pengembangan Mangrove Information Center.

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti pada akuntabilitas program menunjukkan fakta bahwa pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau Mangrove Information Center Wonorejo Surabaya pada program yang menjadi prioritas pada pengelolaan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya adalah penghijauan terhadap tanaman mangrove. Pembinaan-pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian kepada pengelola dan para pedagang belum ada, baik pembinaan secara langsung atau melalui virtual. Pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya sudah di lengkapi dari Pemerintahan Kota meliputi bahan-bahan yang diperlukan, anggaran yang dibutuhkan. Dan pengelola hanya melaksanakan perbaikan apa yang kurang dan apa yang rusak pada Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya. Namun, terdapat permasalahan terhadap lingkungan (sampah) dari masyarakat sekitar masih kurang akan kesadaran kebersihan setempat dan itu juga merupakan salah satu penghambat melakukan program penghijauan di dalam Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya.

Adapun berdasarkan hasil observasi peneliti menunjukkan fakta bahwa akuntabilitas kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/*Mangrove Information Center* Wonorejo Surabaya pada hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan mangrove ini adalah membuat Kebun Raya Mangrove menjadi tempat pembelajaran bagi wisatawan bukan hanya untuk tempat wisata saja akan tetapi digunakan untuk menambah edukasi terhadap tanaman mangrove dan sebagainya. Tidak lupa juga dengan bentuk pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian/*Mangrove Information Center* ini yakni dengan adanya korlap dan beberapa staf keamanan pengelola yang saling membantu atas pengawasan Kebun Raya Mangrove. Lalu dengan menyediakan dan memberikan informasi terkait Kebun Raya

Mangrove Wonorejo pengelola ekowisata atau *Mangrove Information Center* (MIC) tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi secara luas yang dimana wewenang tersebut sudah merupakan tanggungjawab dari DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) pusat. Berdasarkan hasil observasi peneliti pada akuntabilitas finansial menunjukkan fakta bahwa tidak adanya dengan pengelolaan laporan keuangan pada setiap anggaran yang di keluarkan pada *Mangrove Information Center*, sehingga belum ada pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai anggaran keuangan yang ada oleh *Mangrove Information Center*. Lalu pada orientasi ini bukan hanya untuk tempat.

Dengan adanya keberadaan Kebun Raya Mangrove Surabaya dalam kesejahteraan yakni yang pertama ada *Mangrove Information Center* Surabaya yang bertugas untuk mengelola sarana dan prasarana kawasan wisata dan mengelola pembelian karcis atau biasa disebut dengan tiket tempat parkir dalam kawasan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya. Lalu yang kedua yakni ada masyarakat sekitar yang dimana sebagian besar pedagang yang berjualan disekitar kawasan Sentra Kuliner Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa pada dimensi akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan telah dikatakan memadai dan terpenuhi karena beberapa hal yaitu: pada *Mangrove Information Center* Wonorejo Surabaya sudah terbilang cukup efektif dan efisien untuk memberikan informasi yang jelas dalam pekerjaan, lalu dalam pengelolaan kebun raya mangrove terdapat program penghijauan yang menjadi program prioritas dalam mendirikan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya. Kemudian hasil dari tujuan kebijakan izin mendirikan mangrove ini adalah membuat kebun raya mangrove menjadi tempat wisata dan edukasi bagi wisatawan sehingga dampak kebun raya mangrove ini bagi masyarakat sekitar sangatlah besar untuk menambah perekonomian keluarga dan dapat membantu masyarakat sekitar yang tidak punya peluang pekerjaan di luar.

Sementara pada aspek dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran dan akuntabilitas finansial masih belum memadai dan terpenuhi karena dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 23 Tahun 2012 belum terlaksana maksimal. Kemudian pada pengelolaan kebun raya mangrove tidak adanya dengan pengelolaan laporan keuangan pada setiap anggaran yang dikeluarkan dan pemasukan oleh *Mangrove Information Center*, sehingga belum ada pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan mengenai anggaran keuangan yang ada.

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan usaha untuk meneliti akuntabilitas pengelolaan Kebun Raya Mangrove Wonorejo Surabaya dengan melakukan uji validitas kredibilitas triangulasi sumber data agar bisa membandingkan antara sumber satu dengan sumber lainnya, sehingga data yang dianalisis peneliti menghasilkan suatu kesimpulan dan dimintakan kesepakatan antar sumber.

Daftar Pustaka

- Ahyar, H., Andriani, H. & Sukmana, D.J. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu.
- Almashhadani, M. 2021. A brief Review of Corporate Governance Structure and Corporate Profitability in Developed and Developing economy : A review. (November).
- Astawa, N.P. & Dewi, N.W.Y. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Objek Wisata Aling-Aling Waterfall Sebagai Pendapatan Tambahan Desa Sambangan. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1): 1.
- Bovens, M. 2007. Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4): 273–304.
- Castiglione, D. 2012. *Accountability*. Encyclopedia Britannica.
- Dona Octavia & Irma Yeny, K. I. . G. 2020. *Pengelolaan Hutan Secara Partisipatif Menuju KPH Hijau Untuk Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Deepublish Publisher.
- Elsa 2022. Peran Pariwisata dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Spasial*.
- Fahrudin, A. 2018. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Garang, I.J., Mustain, M. & Ikhwan, H. 2020. Analisis dan Pemberdayaan Potensi Wisata Mangrove Wonorejo. 9(2).
- Gibran, K., Jaddang, S. & Ardiansyah, M. 2021. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di kecamatan Jangka. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(1): 69–82.
- Hertati, D. 2020. Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Analisis Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya. *Global and Policy Journal of International Relations*, 8(02): 147–158.
- Hilman, Y.A. & Kartika, T. 2020. Dinamika Kelembagaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Ponorogo. *Indonesian Journal of Tourism and Leisure*, 1(1): 26–37.
- Idrus, A. Al, Liwa, I.M., Hadiprayitno, G. & Mertha, G. 2018. Sosialisasi Peran dan Fungsi Mangrove Pada Masyarakat di Kawasan Gili Sulat Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 1(1): 52–59.
- Indriasih, D. & Sulistyowati, W.A. 2022. The Role of Commitment, Competence, Internal Control system, Transparency and Accessibility in Predicting the Accountability of Village Fund Management. *The Indonesian Accounting Review*, 12(1): 73.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Corporate Governance: Values, Ethics and Leadership*, 77–132.
- Kemenkeu.go.id 2018. Akumulasi Penyaluran Dana Desa Hingga Tahun 2018 Tahap 2 Mencapai Rp149,31 Triliun.
- Kemendikbud 2020. Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia. *Kementrian Pariwisata & Ekonomi Kreatif*, 1–68. Tersedia di https://bankdata.kemendikbud.go.id/upload/document_satker/a6d2d69c8056a29657be2b5ac3107797.pdf.
- Kemendikbud 2021. *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara*. Badan Pusat Statistik/BPS-Statistics Indonesia.
- Kholm, M. 2010. Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi. 357–369.
- Kunen, K.L. 2015. Transparansi , Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Kemitraan Pengelolaan Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Surabaya antara Pemerintah , Sektor Swasta dan Masyarakat Sipil Latifha Kunen Kurnia. 3: 1–10.

- Mardiasmo 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
- Mu'im, A. 2022. Penyempurnaan Pengukuran Kontribusi Pariwisata: Alternatif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Kepariwisata Indonesia*, 16: 1–14.
- Mulgan, R. 2000. Accountability An Ever Expanding Concept. *'Accountability': an Ever-Expanding Concept?*, 1(ACCOUNTABILITY): 19.
- Murtini, S. 2017. Keseuaian dan Daya Dukung Kawasan Ekowisata Mangrove Wonorejo Kota Surabaya. 220–227.
- Putu, D., Prayudi, M.A. & Prayudi, M.A.W. 2018. Mengungkap Minat dan Perilaku Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kelompok Sadar Wisata Tanjung Mekar (Studi Kasus Pada Kelompok Sadar Wisata Tunjung Mekar Desa Sambangan , Kecamatan Sukasada , Kabupaten Buleleng , Provinsi Bali). *Jurnal Ilimiah Mahasiswa Akuntansi*, 19(1).
- Reva Amanda Putra, Romano, S. 2019. Analisis Dampak Wisata Alam Terhadap Kondisi Sosial Dan Ekonomi Masyarakat Desa Iboih Kecamatan Surakarya Kota Sabag. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 4(1): 139–148.
- Rusdiana, E. & Hardjati, S. 2019. Pengembangan Destinasi Wisata Mangrove Wonorejo Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. *Administrasi Publik*, 1: 74–85.
- Saputra, A. & Ali, K. 2020. Analisis Kebijakan Pariwisata Terhadap Pengelolaan Objek Wisata Di Kabupaten Samosir. *Warta Dharmawangsa*, 14(4): 564–584.
- Scott 1997. Agency Theory.
- Shil, N.C. 2014. Accounting For Good Corporate Governance Accounting For Good Corporate Governance. (January 2008).
- Solihin, D. 2007. Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia.
- Sondang Selida Apryastuti Purba, Ika Kristianti, J. & Matitaputty, S. 2022. Akuntabilitas Dalam Pandangan Sakai Sambayan. 6(2014): 3592–3603.
- Suartini, N.N. & Utama, M.S. 2011. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. *Fakultas Ekonomi Universitas Udayana*, 175–189.
- Sugioyono 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susio, J., No, Y., Malang, K., Depok, K., Sleman, K. & Yogyakarta, D.I. 2020. Evaluasi Dampak Pengembangan Pariwisata Menggunakan Konsep Comunity Based Tourism (CBT) Di Kawasan Wisata Tebing Breksi. 14(2): 109–124.
- Tarigan, N.P., Purwanti, F. & Hendrarto, B. 2018. Kelayakan Wisata Alam Di Maroon Mangrove Edu Park Semarang. *Management of Aquatic Resources Journal (MAQUARES)*, 6(3): 274–282.
- Yanti, R.A.E. & Arifin, N.R. 2020. Akuntabilitas Pemanfaatan Tanah Bengkulu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perangkat Desa. *Sosio e-Kons*, 12(3): 213.
- Yanto, M. & Efendi, Y. 2021. An Analysis of Marine Tourism Object Development as A Contribution Towards Community Welfare in Lamongan District. *Journal of International Conference Proceedings*, 3(4): 96–106.
- Yati Haryati, Layaman, I.M. 2022. Analisis Dampak Wisata Terhadap Pendapatan Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. *Multidisciplinary Journal*, 01(01): 29–39.
- Zainuddin, R.A. 2018. akuntabilitas praktik pengelolaan keuangan desa Gamtala, Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. 03: 1–20.